

ABSTRAK

Rifki Indar Kusuma, 20382071034, *Keterwakilan Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Jihan Amalia Syahidah, M. Sos.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, Keterwakilan Perempuan, Kontestasi Politik

Perempuan masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terutama dalam bidang politik yang dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang menganggap politik bukanlah tempat bagi perempuan. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengeluarkan *affirmative action* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Meskipun dengan adanya *affirmative action* tersebut, anggota perempuan di DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2019-2024 hanya berjumlah dua orang.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan. 2) Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik pada Pemilu Tahun 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data berupa fakta empiris di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari anggota perempuan DPRD Kabupaten Pamekasan, partai politik, serta masyarakat perempuan, juga data sekunder berasal dari buku, Undang-Undang, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *affirmative action* tentang keterwakilan perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mendapatkan dukungan dari masyarakat dan partai politik. Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai persyaratan pemilu dinilai penting untuk menjaga nilai demokrasi di negara Indonesia. Selain itu, perempuan dinilai sebagai warna baru dalam politik dan perwakilan terbaik bagi perempuan itu sendiri. Terdapat juga aturan tentang pengaturan nomer urut, yaitu setidaknya terdapat satu perempuan dari tiga nomer urut. Dengan sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada pemilu 2019 maka penentuan nomer urut penting dikarenakan dapat menentukan kemenangan calon legislatif (caleg). Dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka maka perempuan yang berhasil terpilih untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan pada pemilu 2019 adalah keinginan langsung dari rakyat dan bukan sebuah formalitas. Mekanisme partai politik dalam penentuan nomer urut caleg dinilai pada potensi kemenangan caleg yang didasarkan pada elektabilitas caleg. Elektabilitas dianggap dapat diperoleh dari *power of money*, dan partisipasi caleg dalam kehidupan masyarakat. Perempuan yang sejak awal memiliki elektabilitas yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, juga keterbatasan finansial dan waktu menjadi hambatan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di DPRD Pamekasan.